

**PERANAN DINAS SOSIAL DALAM PENANGANAN  
FAKIR MISKIN DI KABUPATEN SIMALUNGUN**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**NIAT AGUSTIANI HURA**

**188510010**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2022**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 8/9/22

Access From (repository.uma.ac.id)8/9/22

**PERANAN DINAS SOSIAL DALAM PENANGANAN  
FAKIR MISKIN DI KABUPATEN SIMALUNGUN**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Medan Area**

**OLEH:**

**NIAT AGUSTIANI HURA**

**188510010**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2022**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/9/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)8/9/22

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Peranan Dinas Sosial Dalam Penanganan Fakir Miskin Di  
Kabupaten Simalungun.

Nama Mahasiswa : Niat Agustiani Hura

NPM : 188510010

Program Studi : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

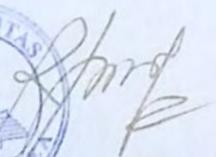
Disetujui Oleh:

Komisi Pembimbing

  
Beby Masitho Batubara, S.Sos, M.AP  
Pembimbing I

  
Nina Angelia, S.Sos, M.Si  
Pembimbing II

Mengetahui:

  
  
Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si  
Dekan

  
Dr. Novita Wulandari, S.ST, M.Si  
Ka. Prodi Ilmu Pemerintahan

Tanggal Lulus : 05 Agustus 2022

### LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari berbagai sumber telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika dalam penulisan karya ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 05 Agustus 2022

Niat Agustiani  
188510010



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Niat Agustiani Hura  
Npm : 188510010  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalti-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : Peranan Dinas Sosial Dalam Penanganan Fakir Miskin Di Kabupaten Simalungun

Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan  
Pada tanggal : 01 September 2022  
Yang Menyatakan

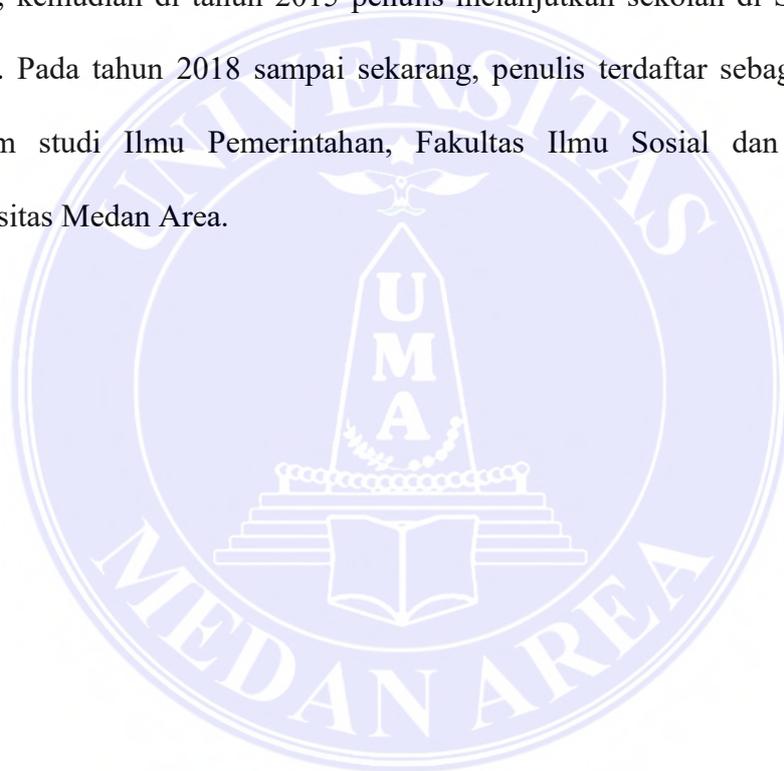
Niat Agustiani Hura  
188510010



## RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Niat Agustiani Hura, anak dari Yusudin Hura dan Erniwati Larosa. Lahir di Nias pada tanggal 21 Agustus 2000. Penulis merupakan anak ke 3 (tiga) dari 4 (empat) bersaudara.

Penulis bersekolah di Sekolah Dasar Negeri 066667 Medan pada tahun 2006, selanjutnya pada tahun 2012 penulis melanjutkan sekolah di SMP Negeri 29 Medan, kemudian di tahun 2015 penulis melanjutkan sekolah di SMA Negeri 8 Medan. Pada tahun 2018 sampai sekarang, penulis terdaftar sebagai mahasiswa program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.



## ABSTRAK

### PERANAN DINAS SOSIAL DALAM PENANGANAN FAKIR MISKIN DI KABUPATEN SIMALUNGUN

Peranan Dinas Sosial dalam penanganan fakir miskin masih belum berjalan dengan baik karena salah satu faktor yang mengakibatkan masih banyaknya jumlah fakir miskin di Kabupaten Simalungun yang kurang baik pengakuannya sebagai orang miskin yang membutuhkan bantuan tidak mendapat bagian dalam program tersebut. Hal ini dikarenakan faktor-faktor yang terlibat dalam penanganan fakir miskin belum dikoordinasikan secara optimal baik dari kalangan masyarakat maupun pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan Dinas Sosial dan hambatan dalam penanganan fakir miskin di Kabupaten Simalungun. Teori yang digunakan pada penelitian adalah Veitzal Rivai (2004:148) terdiri dari indikator perencanaan, pemosisian, dan penilaian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif, dan terdiri dari informan kunci, utama, dan tambahan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Dinas Sosial dalam penanganan fakir miskin di Kabupaten Simalungun masih belum berjalan dengan efektif dalam penyaluran bantuan untuk membantu masyarakat fakir miskin. Hambatan Dinas Sosial dalam penanganan fakir miskin di Kabupaten Simalungun ialah kurangnya sumber daya manusia serta sarana dan prasarana tidak memadai.

**Kata kunci: Peranan, Penanganan, Fakir Miskin.**

## ABSTRACT

### **THE ROLE OF SOCIAL SERVICES IN TREATING THE POOR**

#### **IN SIMALUNGUN DISTRICT**

*The role of the Social Service in handling the poor is still not going well because one of the factors that results in the large number of poor people in Simalungun Regency who are not well recognized as poor people who need assistance are not participating in the program. This is because the factors involved in handling the poor have not been coordinated optimally from both the community and the government. This study aims to determine the role of the Social Service and the obstacles in handling the poor in Simalungun Regency. The theory used in this research is Veitzal Rivai (2004:148) consisting of planning, positioning, and assessment indicators. This study uses a qualitative method with a descriptive type, and consists of key, main, and additional informants. Data collection techniques were carried out by means of observation, interviews, and documentation. The results showed that the role of the Social Service in handling the poor in Simalungun Regency was still not running effectively in distributing aid to help the poor. The obstacle for the Social Service in handling the poor in Simalungun Regency is the lack of human resources and inadequate facilities and infrastructure.*

**Keywords: Role, Handling, The Poor.**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan karunia-Nya yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Peranan Dinas Sosial Dalam Penanganan Fakir Miskin Di Kabupaten Simalungun”**.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan persyaratan untuk menyelesaikan Studi Strata satu (SI) Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. Dalam penulisan Skripsi ini, dengan segala kemampuan yang ada, masih banyak terdapat kekurangan dan mungkin masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun maupun mengarah kepada penyempurnaan Skripsi ini. Sehingga Skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dan kerjasama baik secara materi maupun moril dari berbagai pihak, khususnya dosen pembimbing, maka untuk itu penulis banyak mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Medan Area Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng,Sc
2. Ibu Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr. Novita Wulandari, S.ST, M.Si, selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

4. Ibu Beby Masitho Batubara, S.Sos, M.AP selaku dosen pembimbing I (pertama) yang telah banyak meluangkan waktu pikiran dan tenaga dalam memberikan bimbingan maupun saran kepada penulis.
5. Ibu Nina Angelia, S.Sos, M.Si, selaku pembimbing II (kedua) yang telah memberikan banyak saran sehingga penyusunan dan penyempurnaan skripsi ini hingga selesai.
6. Bapak Fahrul Azmi, S.Sos, M.AP selaku sekretaris, yang telah memberikan saran dan tanggapan dan memberikan pengetahuan kepada penulis dalam skripsi ini.
7. Bapak/Ibu dosen beserta staff pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area yang telah banyak memberikan ilmu dan informasi selama perkuliahan kepada penulis.
8. Bapak Sakban Saragih, SP,M.Si, selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Simalungun, Bapak Andar Abdi Saragih, SP.M.Si, selaku Kepala Bidang Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Simalungun, Bapak Ando Saragih, S.Sos, selaku Kepala seksi Penanganan Fakir Miskin di Bidang Pemberdayaan Sosial Kabupaten Simalungun dan masyarakat Kabupaten Simalungun yang telah membantu dan memberikan informasi selama pelaksanaan penelitian dilakukan.
9. Orang tua tercinta, Ibunda Erniwati Larosa yang memberikan doa tulus dan semangat kepada penulis, dan Ayahanda Alm. Yusudin Hura yang menguatkan penulis untuk berjuang dalam menyelesaikan pendidikan dan ini merupakan hadiah kepada Alm. Ayahanda dan juga yakni Abang sulung William Piter

Chandra Hura, Abang ke dua Dedi Chandra Hura, dan Adik Mardian Chandra Hura.

10. Rekan-rekan mahasiswa stambuk 2018 program Ilmu Pemerintahan yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah saling membantu dan memberikan dorongan moral dalam penulisan skripsi ini.

Atas bantuan dari berbagai pihak yang tak ternilai harganya, penulis mengucapkan banyak terima kasih yang tulus sebesar-besarnya. Semoga Tuhan melimpahkan berkahnya serta membalas budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Dengan ini, penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak.

Medan, 05 Agustus 2022



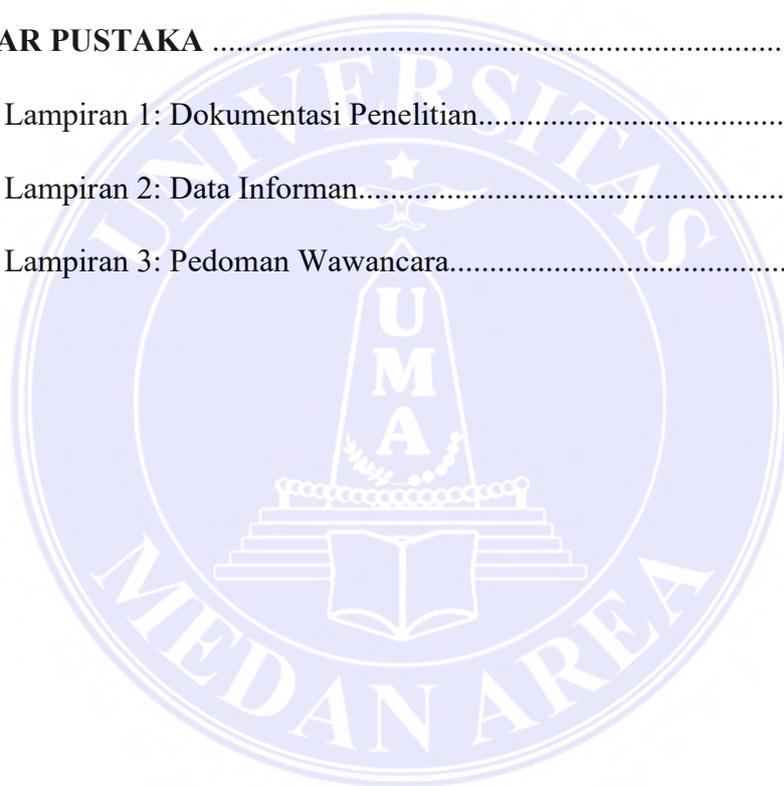
**NIAT AGUSTIANI HURA**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>	<b>iii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>8</b>
2.1 Peranan.....	8
2.1.1 Pengertian peranan .....	8
2.1.2 Bentuk dan Macam-macam Peranan.....	11
2.1.3 Langkah-langkah Peranan .....	12
2.2 Fakir Miskin .....	13
2.2.1 Pengertian Fakir Miskin .....	13

2.2.2 Indikator Fakir Miskin .....	17
2.2.3 Penanganan Fakir Miskin.....	19
2.3 Kemiskinan.....	22
2.3.1 Pengertian Kemiskinan.....	22
2.3.2 Faktor-faktor penyebab kemiskinan.....	24
2.3.3 Indikator Kemiskinan.....	27
2.4 Studi Relevan .....	28
2.5 Kerangka Berpikir.....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>34</b>
3.1 Jenis dan Tipe Penelitian.....	34
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	35
3.3 Informan Penelitian.....	37
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.5 Metode Analisis Data.....	39
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>41</b>
4.1 Hasil Penelitian.....	41
4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	41
4.1.2 Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Simalungun.....	42
4.1.3 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Simalungun...	43
4.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Simalungun.....	44
4.2 Pembahasan.....	46
4.2.1 Peranan Dinas Sosial Dalam Penanganan Fakir Miskin Di Kabupaten Simalungun.....	46
4.2.2 Perencanaan.....	48

4.2.3	Pemosisian.....	51
4.2.4	Penilaian.....	54
4.2.5	Hambatan Dinas Sosial dalam pelaksanaan penanganan Fakir Miskin Di Kabupaten Simalungun.....	57
<b>BAB V PENUTUP.....</b>		<b>61</b>
5.1	Kesimpulan.....	61
5.2	Saran.....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>63</b>
Lampiran 1: Dokumentasi Penelitian.....		66
Lampiran 2: Data Informan.....		70
Lampiran 3: Pedoman Wawancara.....		72



## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
<b>Gambar 4.1</b> Peta Lokasi Kabupaten Simalungun.....	42



## DAFTAR BAGAN

	<b>Halaman</b>
<b>Bagan 2.1:</b> Kerangka Pemikiran Penelitian.....	33
<b>Bagan 4.1:</b> Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Simalungun.....	43



## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
<b>Tabel 2.1</b> Penelitian Terdahulu.....	28
<b>Tabel 3.1</b> Waktu Penelitian.....	36



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kemiskinan pada hakikatnya mengacu pada suatu keadaan penderitaan dan ketidakberdayaan yang dialami oleh seseorang karena negara atau masyarakatnya tidak dapat memberikan perlindungan sosial. Salah satunya diperlihatkan oleh fenomena kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS Sumatera Utara, pada bulan September tahun 2021 sebanyak 1,27 juta penduduk miskin dan dengan berpenghasilan maksimal 525 ribu/bulan. Dilihat dari kawasan pemukiman, persentase penduduk miskin di perkotaan sebesar 8,8% dan di perdesaan sebesar 9,05% bahwa penduduk miskin di perdesaan lebih banyak daripada di perkotaan. Kemiskinan yang terjadi di berbagai daerah selalu menjadi masalah yang serius.

Karena seseorang yang miskin melahirkan generasi penerus yang berkekurangan dan relatif berpendidikan rendah, sehingga sulit bersaing dengan sumber daya manusia yang berpendidikan tinggi ketika memasuki pasar tenaga kerja. Hal ini dikarenakan masyarakat yang berpendidikan rendah cenderung tidak memilih pekerjaan yang berbeda dengan yang berpendidikan tinggi, dan lebih selektif dalam memilih pekerjaan. Selain itu, penduduk berpendidikan rendah terutama yang berasal dari masyarakat miskin harus segera bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Keterbatasan modal juga bisa menjadi penghambat pertumbuhan seseorang. Belum lagi jika seseorang tersebut memiliki tingkat pendidikan rendah. Mengingat banyak penyebab rendahnya pendidikan salah satunya ialah faktor ekonomi keluarga. Dengan bahan makanan yang kian hari melambung tinggi. Akibatnya, masyarakat harus mengurangi pengeluaran untuk kebutuhan lain dan mengarahkannya ke konsumsi makanan. Dan ini menjadi alasan masyarakat miskin kerap sekali merasa kurang dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Masalah peningkatan kemiskinan di Sumatera Utara ini lebih dipengaruhi oleh penurunan serta hilangnya sejumlah pendapatan masyarakat, yang berimbas ke daya beli.

Bahkan kemiskinan terjadi di berbagai kota/kabupaten di Sumatera Utara termasuk di Kabupaten Simalungun. Adapun tingkatan kemiskinan di berbagai kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara adalah yang pertama di Nias, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba Samosir, Labuhan Batu, Asahan, Simalungun, Dairi. Untuk tingkat kemiskinan di Kabupaten Simalungun berada pada nomor urut ke-9. Kabupaten Simalungun salah satu Kabupaten yang terletak di Sumatera Utara, Indonesia. Kabupaten yang terdiri dari 32 kecamatan dan 386 desa.

Adapun jumlah penduduk secara keseluruhan yang ada di Kabupaten Simalungun sebanyak 1.038.120 jiwa dengan kepadatan 237 jiwa/km<sup>2</sup>. Kabupaten Simalungun merupakan salah satu daerah yang mempunyai jumlah penduduk miskin hingga pada tahun 2021 saat ini tercatat dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yaitu 527.006 jumlah penduduk fakir miskin berjumlah

161.168 jiwa (Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Simalungun, 2021). Dengan penduduknya yang masih bermata pencaharian bercocok tanam. Masyarakat Simalungun juga memiliki sistem mata pencaharian bercocok tanam yaitu padi dan jagung, karena padi merupakan makanan pokok sehari-hari dan jagung merupakan makanan tambahan jika hasil padi tidak mencukupi. Jual-beli diadakan dengan barter, tetapi pekerjaan ini belum bisa menyejahterakan masyarakatnya sebab pemasukan dari bercocok tanam belum sanggup penuh kebutuhan hidup.

Penghasilan yang didapat dalam bercocok tanam dalam seminggu bisa mencapai Rp. 450.000,- s/d Rp. 1.000.000,- jika dari hasil panen lebih banyak diperoleh untuk dijual. Bahkan dalam sebulan pendapatan bisa mencapai Rp. 1.500.000,- s/d Rp. 2.500.000,- ke atas. Berbagai langkah strategis yang dilakukan pemerintah daerah untuk mendukung upaya penanggulangan kemiskinan melalui program/kegiatan intervensi secara terpadu antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Pendataan fakir miskin tidak hanya dilakukan oleh Dinas Sosial saja, tetapi dibantu oleh beberapa instansi lain juga terkait dengan pengentasan kemiskinan.

Mayoritas masyarakat fakir miskin di Kabupaten Simalungun bekerja sebagai seorang petani, yang penghasilannya tidak menentu dikarenakan tergantung pada kondisi alam. Selain bekerja sebagai petani masyarakat di Kabupaten Simalungun mencari pekerjaan sampingan yaitu ada yang sebagai pekerja bangunan bahkan menjadi pembantu rumah tangga, hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang semakin meningkat. Dilihat dari kondisi kebanyakan masyarakat di Kabupaten Simalungun merupakan masyarakat yang tidak mampu atau miskin, masyarakat yang membutuhkan bantuan untuk

menyambung hidup dan memenuhi akan kebutuhan sehari-harinya. Maka dari itu masyarakat fakir miskin di Kabupaten Simalungun memerlukan bantuan baik dari Pemerintah Kabupaten Simalungun maupun dari Pemerintah Pusat.

Khususnya untuk Kabupaten Simalungun program penanganan fakir miskin dilakukan dengan berbagai langkah dan strategi yang telah dirancang untuk meminimalisir perkembangan masalah ini sesuai dengan Peraturan kebijakan Kabupaten Simalungun dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83). Maka dari itu perlu adanya bantuan bagi keluarga yang kurang mampu atau miskin. Sehubungan dengan penugasan tersebut Pemerintah Kabupaten Simalungun melalui Dinas Sosial telah banyak melakukan berbagai cara untuk mengurangi masalah kemiskinan yang timbul, mulai dari berbagai program penanggulangan kemiskinan sudah dilaksanakan akan tetapi masih saja kemiskinan belum berkurang.

Program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Simalungun yaitu Program Penanganan Fakir Miskin Melalui Kegiatan Pemberdayaan Sosial, program Pelayanan dan rehabilitasi sosial, program sosialisasi, program lainnya adalah perluasan bantuan sosial. Akan tetapi dalam pelaksanaan penanganan fakir miskin ini ternyata masih banyak yang kurang berjalan dikarenakan salah satu faktor yang mengakibatkan sebagian masyarakat yang kurang baik yaitu pengakuannya sebagai orang miskin, terutama ketika ada program dari pemerintah sehingga tak jarang orang miskin yang membutuhkan bantuan tidak mendapatkan bagian dalam program tersebut. Hal ini dikarenakan

faktor-faktor yang terlibat dalam penanganan fakir miskin belum dikoordinasikan secara optimal baik dari kalangan masyarakat maupun pemerintah.

Permasalahan kemiskinan ini merupakan hal yang serius untuk ditangani, dan ditanggulangi oleh wilayah Kabupaten Simalungun. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia pasal 1 ayat 2 tentang Penanganan Fakir Miskin yang menyatakan bahwa penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah dan terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, dan pemerintah daerah, atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program, dan kegiatan pendampingan, serta fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Bagi fakir miskin seperti yang dimaksudkan di atas, pemerintah dan pemerintah daerah memberikan pelayanan sosial sebagai pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin agar terpenuhinya hak dasar atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu.

Begitu pun perlunya peranan Dinas Sosial maupun dari masyarakat, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, maupun lembaga kesejahteraan sosial demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah. Karena kemiskinan merupakan masalah sosial ekonomi, bukan hanya di negara berkembang saja yang mengalami kemiskinan tetapi juga negara maju itu sendiri. Maka dari itu peranan Dinas Sosial Kabupaten Simalungun harus bisa membangun kesejahteraan sosial di kalangan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas untuk mengetahui secara jelas tentang permasalahan yang terjadi dibutuhkan penelitian yang akurat. Maka penulis tertarik untuk memilih masalah ini dengan melakukan penelitian yang berjudul sebagai

berikut: **“Peranan Dinas Sosial Dalam Penanganan Fakir Miskin Di Kabupaten Simalungun”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan sebelumnya, maka di rumuskan masalah sebagai dasar penelitian yang akan dilakukan. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana peranan Dinas Sosial dalam penanganan Fakir Miskin di Kabupaten Simalungun ?
2. Apa saja hambatan Dinas Sosial dalam pelaksanaan penanganan Fakir Miskin di Kabupaten Simalungun?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui bagaimana peranan Dinas Sosial dalam penanganan Fakir Miskin di Kabupaten Simalungun.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan Dinas Sosial dalam pelaksanaan penanganan Fakir Miskin di Kabupaten Simalungun.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Akademis

Bisa untuk memperkaya khazanah kepustakaan di bidang Ilmu Pemerintahan dan sebagai tambahan wawasan ilmiah dan ilmu pengetahuan.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa jadi tolak ukur keilmuan baik untuk masyarakat ataupun lembaga yang bersangkutan.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Peranan

##### 2.1.1 Pengertian Peranan

Peranan merupakan suatu yang menjadi bagian ataupun yang dipegang oleh pimpinan terutama dalam terbentuknya sesuatu perihal ataupun kejadian (Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia).

Secara universal peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan ataupun status. Disini arti peranan lebih merujuk pada fungsi penyesuaian diri serta dari suatu proses, lebih tepatnya ialah kalau seseorang menjalani ataupun menduduki posisi (status) ataupun tempat dalam masyarakat.

Peran diartikan sebagai serangkaian tindakan yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan ialah tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa. Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Ketika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan.

Dari perbedaan kedudukan dan peranan merupakan suatu kepentingan untuk ilmu pengetahuan. Hal ini tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain bahkan sebaliknya, yang dimana bisa dikatakan tidak ada peranan tanpa kedudukan ataupun kedudukan tanpa peranan. Maka dari itu Soejono Soekanto menjelaskan tentang peranan (*role*) yang memiliki arti:

1. Aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimana dijelaskan ketika seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dikatakan orang tersebut telah menjalankan suatu peranan di dalamnya.
2. Perilaku aktual dan pemegang kedudukan yang dimaksud ialah perilaku yang merupakan fungsi dari sikap terhadap perilaku yang berkaitan dengan norma.
3. Bagian dan aktivitas yang dimainkan oleh seseorang peran yang terlibat setidaknya mencakup tiga hal. Peranan meliputi norma-norma yang berkaitan dengan kedudukan atau tempat. Peranan ialah sebuah konsep tentang apa yang dapat dilakukan seorang individu dalam masyarakat. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku pribadi yang penting bagi struktur sosial menurut Emanuel (2020:1185).

Peranan merupakan serangkaian perilaku yang teratur, yang terdiri dari posisi tertentu, atau bisa juga karena adanya tempat ataupun kantor yang dikenal. Kepribadian seseorang juga sangat dapat mempengaruhi bagaimana peranan bisa dijalankan dengan baik. Seseorang akan memahami bahwa ketika melakukan sebuah pekerjaan akan diperlukan sebuah interaksi mulai dari lingkungan yang berbeda. Tetapi peranan yang dimainkan pada dasarnya tidak ada perbedaan menurut Miftah Thoha (2012:10).

Menurut Soekanto, Soerjono serta Sulistyowati, Budi, (2017:211) peranan mencakup norma- norma yang diungkapkan dengan posisi ataupun tempat seorang dalam masyarakat.

1. Peranan ialah sesuatu konsep tentang yang dilakukan individu.

## 2. Peranan dikatakan perilaku yang berarti sebagai struktur sosial masyarakat

David Berry (2003: 105) mendefinisikan peranan sebagai harapan-harapan yang dikenakan oleh individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Harapan-harapan yang dimaksud ialah imbang dari norma-norma sosial di dalam masyarakat. Dalam peranan terdapat dua harapan yaitu harapan yang dipunyai oleh sang pemegang kedudukan terhadap masyarakat ataupun terhadap orang yang melaksanakan peranannya dan kewajibannya. Dari pendapat David Berry tersebut bisa disimpulkan peranan merupakan perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang melalui kewajibannya dari jabatan ataupun pekerjaannya.

Sedangkan menurut Veitzal Rivai (2004:148) peranan yang dimaksud ialah sebagai perilaku yang diatur serta diharapkan seseorang dalam posisi tertentu. Adapun indikator-indikator peranan menurut Veitzal Rivai di antaranya perencanaan, pemosisian, dan penilaian. Pada perencanaan, meningkatkan kemitraan atau bekerjasama antar instansi lain dan melakukan sosialisasi seperti penyuluhan yang akan dilakukan. Pada pemosisian, penyesuaian keterampilan dan kedudukan. Pada penilaian, berupa monitoring dan evaluasi. Peranan merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan hasil dari pola budaya yang terkait dengan adanya status menurut Robert Linton (1936). Kemudian menurut Ali (2000:148) peranan merupakan suatu yang jadi bagian yang memegang pimpinan yang terutama dalam terbentuknya suatu perihal ataupun kejadian.

Berdasarkan pengertian di atas bisa disimpulkan bahwa peranan merupakan cara menentukan sikap yang membatasi perilaku seseorang apa yang harus dilakukan seseorang tersebut dalam menduduki suatu posisi.

## 2.1.2 Bentuk dan Macam-macam Peranan

### a. Bentuk Peranan

Dari pengertian mengenai peranan maka bentuk peranan bisa dilihat dalam bentuk individu, norma ataupun aturan, institusi atau lembaga, dan sebagainya tergantung pada fungsi dan kegunaan serta harapan-harapan yang diinginkan oleh masyarakat itu sendiri.

### b. Macam-macam Peranan

Peranan di dalam masyarakat dapat diklasifikasikan menurut bermacam-macam cara sesuai dengan berbagai sudut pandang. Berbagai macam peranan dapat dikatakan antara lain:

#### 1) Berdasarkan pelaksanaannya

Berdasarkan pelaksanaannya peranan dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu:

- a) Peranan yang diharapkan (*exected roles*), yaitu cara ideal dalam pelaksanaan peranan menurut penilaian masyarakat. Masyarakat menghendaki peranan ini tidak dapat ditawar dan harus dilaksanakan seperti yang ditentukan.
- b) Peranan yang disesuaikan (*actual roles*), yaitu cara bagaimana sebenarnya peranan itu dilakukan. Pelaksanaan peranan ini lebih fleksibel

dan dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu. Peranan yang disesuaikan mungkin tidak cocok untuk situasi setempat, tetapi kekurangan yang muncul dapat dianggap wajar oleh masyarakat.

## 2) Berdasarkan cara memperolehnya

Berdasarkan cara memperolehnya peranan dapat dibedakan menjadi:

- a) Peranan bawaan (*ascribed roles*), yaitu peranan yang diperoleh secara otomatis, bukan dengan usaha.
- b) Peranan pilihan (*achives roles*), yaitu peranan yang diperoleh berdasarkan keputusannya sendiri.

### 2.1.3 Langkah-langkah Peranan

Dalam menentukan langkah-langkah peranan seseorang ada baiknya memperhatikan apa yang disebutkan oleh Levinson sebagaimana dikutip oleh Basrowi, bahwa peranan paling sedikit harus mencakup tiga hal sebagai berikut:

- a. Peranan meliputi norma- norma yang dihubungkan dengan posisi ataupun tempat seorang dalam masyarakat.
- b. Peranan ialah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh seseorang dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga bisa dikatakan sebagai perilaku individu yang penting untuk struktur sosial masyarakat.

Mengenai macam peranan yang melekat pada individu-individu dalam masyarakat penting bagi hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa peranan-peranan harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya.
- b. Peranan tersebut seharusnya dilekatkan pada individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakannya.
- c. Dalam masyarakat kadang kala dijumpai individu-individu yang tidak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.
- d. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya, belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang-peluang yang seimbang.

## **2.2 Fakir Miskin**

### **2.2.1 Pengertian Fakir Miskin**

Orang-orang yang sangat berkekurangan disebut fakir miskin. Fakir adalah seseorang yang tidak bisa mencukupi setengah asal kebutuhan pokoknya serta tanggungannya (istri dan anak), seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Sedangkan miskin merupakan seorang yang hanya bisa memenuhi setengah atau lebih kebutuhan pokoknya dan tanggungannya, tetapi tidak bisa mencukupi seluruh kebutuhannya.

Adapun menurut beberapa ahli mendefinisikan pemahaman fakir miskin yang berbeda-beda. Berikut definisi fakir miskin menurut beberapa ahli:

1. Menurut Benyamin White bahwa yang dimaksud dengan fakir miskin ialah perbedaan kriteria tingkat kesejahteraan masyarakat dari satu wilayah dengan wilayah lainnya.
2. Menurut Parsudi Suparlan mendefinisikan fakir miskin merupakan suatu standar tingkat hidup yang rendah, yang dimana adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan masyarakat yang bersangkutan.
3. Sedangkan dalam konteks politik, John Friedman mendefinisikan kalau fakir miskin merupakan sebagai suatu ketidaksamaan kesempatan dalam mengakumulasikan basis kekuatan sosial.
4. Departemen Sosial dan Biro Pusat Statistik, mendefinisikan fakir miskin sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk kehidupan yang layak (BPS dan Depsos 2002).

Sedangkan menurut Dinas Sosial sendiri mendefinisikan fakir miskin ialah mereka yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka yang layak bagi kemanusiaan dan bagi yang sudah mempunyai mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan. Maka pemahaman yang dapat kita simpulkan bahwa setiap orang atau kelompok yang sudah mempunyai potensi dan sudah mampu memenuhi kebutuhan primernya maka mereka tidak lagi dikatakan miskin.

Selanjutnya Gillin menyatakan bahwa fakir miskin adalah suatu kondisi di mana seorang individu tidak mampu mempertahankan standar hidup yang cukup

tinggi secara fisik dan mental dan juga tidak mampu memungkinkan dirinya dan keluarganya menjalankan fungsi sebagaimana sesuai standar masyarakat yang baik.

Reitsma dan Kleinpenning berpendapat bahwa fakir miskin adalah kemampuan seorang individu untuk tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, baik materil maupun non materil. Kemudian Suparlan mendefinisikan bahwa fakir miskin merupakan taraf hidup manusia yang rendah, karena menderita kekurangan materi dibandingkan taraf hidup masyarakat sekitarnya.

Dari beberapa pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa, fakir miskin merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh suatu keadaan dimana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya karena faktor-faktor yang mempengaruhi orang tersebut, sehingga sulit untuk memperoleh kesempatan yang sama dengan orang lain.

Menggunakan tolok ukur yang berbeda ketika mengukur kemiskinan dapat menyebabkan pemahaman yang berbeda pula tentang siapa yang harus disebut miskin. Dalam konteks pengentasan fakir miskin, pemerintah telah menetapkan standar bahwa orang yang dikatakan miskin adalah mereka yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya misalnya beras. Masyarakat yang kebutuhan berasnya tidak terpenuhi tergolong miskin.

Adapun yang dimaksud dengan bantuan yang di berikan kepada fakir miskin seperti bantuan sosial (Bansos). Bantuan sosial itu sendiri adalah sebagai pemberian bantuan berupa uang atau barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus

menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Risiko sosial yang dimaksud ialah kejadian atau peristiwa yang dapat mempengaruhi kesejahteraan rumah tangga (masyarakat) yang disebabkan oleh pembebanan tambahan permintaan atas sumber daya.

Pengertian lain juga menyebutkan bahwa risiko sosial terkait dengan kerentanan, yaitu kemungkinan kejadian atau peristiwa yang membuat rumah tangga (masyarakat) yang saat ini tidak termasuk miskin akan jatuh di bawah garis kemiskinan, ataupun jika saat ini berada di bawah garis kemiskinan, akan tetap berada di bawah garis kemiskinan atau semakin jauh terperosok di bawah garis kemiskinan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/ Lembaga mendefinisikan belanja bantuan sosial sebagai pengeluaran berupa transfer uang barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat. Pemberian bantuan sosial disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan dilakukan secara selektif serta setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Pemberian bantuan sosial (Bansos) kepada anggota atau kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud:

- a. Individu, keluarga atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum, dan
- b. Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

### 2.2.2 Indikator Fakir Miskin

Program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Kebutuhan dasar merupakan kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, hingga pelayanan sosial. Melalui kementerian sosial dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat pemerintah telah menetapkan indikator untuk tingkat fakir miskin yaitu di antaranya:

1. Penghasilan rendah yang berada dibawah garis kemiskinan yang dapat di ukur dari tingkat pengeluaran perorangan per bulan berdasarkan standar badan statistika (BPS) per wilayah provinsi dan kabupaten/kota.
2. Ketergantungan pada bantuan pangan kemiskinan seperti: Zakat/raskin/santunan sosial.
3. Keterbatasan memiliki pakaian yang cukup setiap anggota keluarga per tahun (hanya mampu memiliki 1 stel pakaian lengkap).

4. Tidak mampu membayar pengobatan jika ada salah satu keluarga yang sakit.
5. Tidak mampu membiayai sekolah pendidikan dasar 9 tahun bagi anak-anaknya.
6. Tidak mempunyai harta benda yang dapat dijual untuk membiayai kebutuhan hidup.
7. Tinggal di rumah yang tidak layak huni.
8. Kesulitan mendapat air bersih.

Selain hal tersebut, dalam menentukan garis kemiskinan BPS telah menetapkan nilai standar minimum, baik itu berupa makanan dan non makanan yang harus dipenuhi seseorang untuk kehidupan yang lebih layak, yang dimana jika penduduk pengeluarannya tidak sanggup memenuhi kebutuhan konsumsi makanan setara 2.100 kalori per hari ditambah lagi dengan pemenuhan akan kebutuhan pokok minimum non makanan berupa perumahan, pakaian, kesehatan dasar, transportasi, hingga aneka barang/ jasa lainnya, maka dapat di katagorikan miskin. Sama halnya dengan penduduk yang tidak mampu memenuhi kecukupan akan konsumsi makanan setara dengan 1.800 kalori per hari dapat di kategorikan fakir miskin.

Untuk itu BPS (Badan Pusat Statistik) menyusun beberapa kriteria fakir miskin di antaranya yaitu:

1. Dalam rumah luas lantai kurang dari 8m persegi.
2. Jenis lantai terbuat dari bahan kayu murahan, tanah bahkan bambu.
3. Jenis dinding bangunan seperti tembok tanpa plester ataupun dari bambu rumbia.

4. Tidak memiliki fasilitas berupa air bersih.
5. Tidak mempunyai akses pada sumber air minum yang layak digunakan.
6. Sumber penerangan utama bukan listrik tetapi bahan bakar buat masak yang bersumber dari kayu serta arang.
7. Tidak sanggup membeli daging, susu, telur serta ikan seminggu sekali.
8. Tidak sanggup membeli baju baru minimal setahun sekali.
9. Tidak sanggup membayar pengobatan.
10. Pemasukan kurang dari Rp. 600.00,- per rumah tangga per bulan.
11. Tingkat pendidikan ditamatkan paling tidak SD.

### **2.2.3 Penanganan Fakir Miskin**

Penanganan fakir miskin yang dilakukan oleh pemerintah serta pemerintah daerah merupakan turunan dari Pasal 34 ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: Fakir miskin serta anak- anak yang terlantar dipelihara oleh negara untuk mendapatkan pekerjaan serta kesempatan berusaha. Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin.

Fakir miskin ialah orang yang sama sekali tidak memiliki sumber mata pencaharian ataupun memiliki mata pencaharian namun tidak memiliki keahlian untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak kehidupan dirinya serta keluarganya. Setelah itu dalam Pasal 1 angka 2 Undang- undang Fakir Miskin

dipaparkan, yang diartikan dengan penanganan fakir miskin merupakan upaya yang terencana, terpadu, serta berkepanjangan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah ataupun masyarakat dalam bentuk kebijakan, program serta kegiatan pemberdayaan, pendampingan, dan fasilitasi buat memenuhi kebutuhan dasar tiap masyarakat negara.

Data fakir miskin yang telah diverifikasi dan divalidasi disampaikan kepada Menteri Sosial Republik Indonesia. Kemudian Menteri Sosial menetapkan nama-nama fakir miskin, yang nantinya penetapan tersebut merupakan dasar bagi pemerintah pusat, pemerintah Kabupaten/Kota untuk memberikan bantuan.

Hal tersebut berhubungan erat dengan pendataan, terutama tentang kriteria fakir miskin, Undang-undang Fakir Miskin yang mengatur secara ketat dalam hal pendataan untuk menghindari pemalsuan data verifikasi dan validasi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3) Undang-undang Fakir Miskin. Adapun peraturan terkait penanganan fakir miskin yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin.
3. Keputusan Presiden RI Nomor 124 tahun 2001 Nomor 8 tahun 2002 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan.
4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 84/HUK/1997 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Keluarga Fakir Miskin
5. Peraturan daerah Kabupaten Simalungun Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penanganan Fakir Miskin

Dalam peraturan daerah Kabupaten Simalungun Nomor 51 Tahun 2020 tentang penanganan fakir miskin yaitu:

1. Bantuan pangan

Program bantuan pangan dilaksanakan dengan mensubsidi pembelian bahan pangan yang aman, sehat dan higienis.

- a. Tujuan diberikan bantuan pangan minimal 4 kali dalam 1 tahun.
- b. Tata cara dan pelaksanaan untuk program bantuan diatur dalam peraturan daerah.

2. Bantuan pendidikan

- a. Pembebasan biaya masuk ditingkat sekolah dasar (SD) dan pendidikan menengah.
- b. Pembebasan untuk biaya sekolah dasar dan pendidikan menengah melalui beasiswa pemerintah daerah dan juga bantuan penyelenggaraan pendidikan (BPP).

3. Bantuan untuk peningkatan ketrampilan

4. Bantuan modal usaha

- a. Bantuan modal usaha yang diselenggarakan untuk membantu masyarakat miskin dan tidak mampu untuk memperoleh modal untuk usahanya.
- b. Bantuan modal usaha diberikan dalam bentuk dana bergulir, pinjaman dana bergulir dan dari lembaga keuangan dan sarana prasarana usaha.

Adapun penanganan fakir miskin bertujuan untuk:

1. Menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar warga miskin.
2. Mempercepat penurunan jumlah warga miskin.

3. Meningkatkan partisipasi masyarakat.

4. Menjamin konsistensi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi dalam penanganan fakir miskin.

## 2.3 Kemiskinan

### 2.3.1 Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan merupakan fenomena, suatu realitas yang belum dan tidak akan pernah terhapuskan dari muka bumi ini. Kemiskinan mencuat akibat terjadi perbedaan kemampuan, perbedaan kesempatan, serta perbedaan sumber daya (Maipita 2014:1). Kemiskinan senantiasa berkembang dari waktu ke waktu, kondisi kemiskinan itu sendiri terus bermetamorfose dan konvergen menuju peningkatan yang lebih baik. Kondisi yang dikatakan miskin puluhan tahun yang lalu akan berbeda dengan kondisi miskin saat ini.

Kemiskinan sudah jadi permasalahan yang kronik karena berkaitan dengan jurang pemisah dan pengangguran. Jadi pemecahannya pun harus berkaitan serta menyeluruh dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Berbagai macam persoalan kemiskinan masyarakat memang menarik untuk dilihat dari bermacam aspek, sosial, ekonomi, psikologi dan politik. Aspek sosial utamanya mengakibatkan terbatasnya hubungan sosial dan penguasaan maklumat. Aspek ekonomi akan kelihatan pada terbatasnya pemilikan alat pengeluaran, upah kecil, kuasa tawar rendah, tabungan nihil, lemahnya menjangkau peluang.

Masalah pokok yang perlu dipecahkan adalah masalah kemiskinan yang mengalami peningkatan pesat pada saat-saat perekonomian Indonesia terpuruk

sebagai dampak krisis moneter dan krisis ekonomi. Untuk itu perlu dipahami ciri-ciri kemiskinan, serta sebab-sebab terjadinya dan strategi apa yang pas untuk dijalankan. Karena kemiskinan bisa menimpa perorangan, keluarga dan kelompok manusia, maka untuk itu perlu dicari cara strategis dalam memecahkan masalah kemiskinan tersebut.

Kemiskinan ini di alami oleh penduduk berbagai tingkatan umur, tetapi dalam kaitan ini perlu dikembangkan pendekatan untuk dipahami dan memecahkan masalah pengangguran yang tercermin dari kondisi unsur dan banyaknya angkatan kerja yang belum tersalurkan dalam berbagai lapangan kerja sehingga memperoleh kehidupan yang layak bagi masyarakat.

Kemiskinan dibedakan menjadi tiga pengertian: kemiskinan mutlak, kemiskinan relatif, dan kemiskinan budaya. Kemiskinan mutlak dikatakan, apabila hasil pendapatannya berada dibawah garis kemiskinan, dan tidak cukup untuk memenuhi keperluan hidup seperti: minuman, makanan, pakaian, kesehatan, perumahan, dan juga pendidikan lainnya. Seseorang yang tergolong miskin relatif, sebenarnya bisa dibilang telah hidup diatas garis kemiskinan, tetapi masih berada dibawah kemampuan masyarakat sekitarnya. Sedangkan miskin budaya yang dimaksud ialah yang berkaitan erat dengan sikap seseorang ataupun sekumpulan masyarakat yang tidak mau berusaha untuk memperbaiki tahap kehidupannya sekalipun itu ada usaha daripada orang lain yang menyokongnya.

Pendapat Klassen (dalam Maipita 2014:62) bahwa laju pengurangan kemiskinan sangat bergantung pada tingkat pendapatan rata-rata, kondisi awal dari ketimpangan, dan tingkat perubahan dari tingkat ketimpangan tersebut.

Menurut Dollar and Kray (dalam Maipita 2014:62) mengatakan bahwa

pengurangan kemiskinan akan semakin cepat terjadi di negara-negara dengan tingkat pertumbuhan pendapatan rata-rata yang lebih tinggi dan tingkat kesenjangan yang rendah.

Selanjutnya, menurut Djojohadikusumo kemiskinan bisa diartikan melalui dua pendekatan yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut bisa diukur dari suatu standar tertentu, sedangkan kemiskinan relatif bersifat kondisional, dengan membandingkan pendapatan sekelompok orang dengan kelompok lainnya. Kemiskinan absolut ialah kondisi seseorang (atau keluarga) yang pendapatannya bisa dibilang kurang dari pendapatan biasanya yang diperoleh, dan bisa mencukupi beberapa kebutuhan dasar lainnya.

Kemiskinan juga merupakan masalah sosial yang ada di kalangan masyarakat dan merupakan tanggung jawab semua pihak. Disinilah peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam mengurangi kemiskinan karena memiliki kewenangan dan kemampuan hal tersebut. Pemerintah juga telah berupaya keras untuk menanggulangi kemiskinan dan mengurangi pengangguran. Hal ini diwujudkan melalui pelaksanaan pemberian bantuan melalui program-program penanggulangan kepada fakir miskin.

### **2.3.2 Faktor-faktor penyebab kemiskinan**

Batas Kemiskinan pada masing-masing daerah berbeda-beda karena didasarkan pada lokasi yang berbeda dan standar kebutuhan hidup masing-masing daerah. Penyebab kemiskinan dapat terjadi karena kondisi alamiah dan ekonomi, kondisi struktural dan sosial, serta kondisi kultural (budaya). Faktor-

faktor penyebab terjadinya kemiskinan dapat dikategorikan dalam dua hal berikut ini.

### 1. Faktor Internal

Faktor-faktor internal (dari dalam diri individu atau keluarga fakir miskin) yang menyebabkan terjadinya kemiskinan antara lain berupa tidak mampu dalam hal:

- a) fisik (misalnya cacat, kurang gizi, sakit-sakitan).
- b) Intelektual (misalnya kurangnya pengetahuan, kebodohan, kurangnya pengetahuan informasi).
- c) Mental emosional (misalnya malas, mudah menyerah, putus asa, temperamental).
- d) Spritual (misalnya tidak jujur, penipu, serakah, tidak disiplin).
- e) Sosial psikologis (misalnya kurang motivasi, kurang percaya diri, depresi atau stres, kurang relasi, kurang mampu mencari dukungan).
- f) Keterampilan (misalnya tidak mempunyai keahlian yang sesuai dengan permintaan lapangan kerja).
- g) Aset (misalnya tidak memiliki stok kekayaan dalam bentuk tanah. Rumah, tabungan, kendaraan, dan modal kerja).

### 2. Faktor Eksternal

Faktor-faktor eksternal (berada di luar diri individu atau keluarga) yang menyebabkan terjadinya kemiskinan, antara lain:

- a) Terbatasnya pelayanan sosial dasar.
- b) Tidak dilindunginya hak atas kepemilikan tanah.

- c) Terbatasnya lapangan pekerjaan formal dan kurang terlindunginya usaha-usaha sektor informal.
- d) Budaya yang kurang mendukung kemajuan dan kesejahteraan.
- e) Kondisi geografis yang sulit, tandus, terpencil, atau daerah bencana.
- f) Pembangunan ekonomi antar daerah yang belum merata.
- g) Kebijakan publik yang belum berpihak kepada penduduk miskin.

Maka dari itu setiap permasalahan yang terjadi pasti ada faktor-faktor penyebab timbulnya masalah tersebut, seperti pada masalah kemiskinan. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya kemiskinan menurut Kuncoro yaitu:

1. Dari perspektif makro, kemiskinan disebabkan oleh distribusi pendapatan yang tidak merata yang disebabkan oleh kepemilikan sumber daya yang tidak merata, masyarakat miskin memiliki sumber daya yang terbatas dan kualitas yang rendah.
2. Kemiskinan disebabkan oleh perbedaan kualitas sumber daya manusia, karena kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitas yang rendah dan upah yang rendah.
3. Kemiskinan bersumber dari perbedaan akses dan permodalan.

Adapun menurut Ismawan mengutarakan penyebab kemiskinan dan keterbelakangan ini adalah masalah aksesibilitas. Karena pembatasan dan tidak ada pilihan akses manusia mempunyai keterbatasan (bahkan tidak ada) pilihan untuk mengembangkan hidupnya, kecuali menjalankan dengan terpaksa apa yang saat ini dapat dilakukan (bukan apa yang seharusnya). Jadi manusia memiliki

keterbatasan dalam menentukan pilihan, sehingga potensi Manusia mengembangkan hidupnya terhambat.

Sedangkan ada pula beberapa penyebab kemiskinan menurut pendapat Karimah Kuraiyyim antara lain:

1. Tingkat perkembangan pendapatan per kapita global telah menurun.
2. Menurunkan etika profesi dan produktivitas masyarakat.
3. Biaya hidup yang tinggi.
4. Belum meratanya distribusi subsidi pemerintah yang masuk.

### **2.3.3 Indikator kemiskinan**

Disaat pemerintah melaksanakan kebijakan kontraktif pasca Orde Baru, misalnya kebijakan mengurangi subsidi BBM dengan metode menaikkan harga jualnya, sehingga akan berdampak pada pertumbuhan jumlah masyarakat miskin, untuk mengurangi dampak tersebut pemerintah mengambil keputusan kebijakan tambahan yang bersifat ekspansif dan hanya diarahkan bagi masyarakat miskin. Oleh sebab itu perlu adanya kriteria untuk menentukan serta memilih siapa yang berhak mendapatkan bantuan tersebut. Adapun beberapa indikator dan kriteria kemiskinan di antaranya yaitu:

- a. Tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar konsumen (pangan, sandang, dan papan).
- b. Tidak mendapatkan kebutuhan dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transmigrasi).

- c. Tidak ada jaminan masa depan (karena tidak ada investasi pendidikan dan keluarga).
- d. Kerentanan terhadap guncangan individu atau kolektif.
- e. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya sumber daya alam.
- f. Tidak ikut serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.
- g. Kurangnya pekerjaan dan mata pencaharian Berkelanjutan.
- h. Tidak dapat menjalankan usaha karena cacat fisik atau mental.
- i. Ketidakmampuan dan keteringgalan sosial (anak terlantar, wanita korban induk kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok maginal dan terpencil (Suharto, 2005:132).

## 2.4 Studi Relevan

Judul yang akan peneliti kaji berbeda dengan penelitian sebelumnya, akan tetapi terdapat kemiripan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian relevan ini menjadi titik tolak untuk peneliti dalam melakukan penelitian. Adapun kemiripannya, di antaranya pada penelitian:

No.	Peneliti (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian
1.	Duwi Reknani (2015)	Implementasi Program Penanganan Fakir Miskin Melalui Kegiatan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (PS-	-Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penanganan fakir miskin melalui kegiatan PS-KAT yang di implementasikan di Desa Kaliwenang

		<p>KAT) (Di Desa Kaliwenang Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan)</p>	<p>Kecamatan Tanggunharjo dan juga untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh masyarakat Desa Kaliwenang dan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobongan dalam kegiatan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil tersebut.</p> <p>-Metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yang dimana hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya keberhasilan dari pelaksanaan program penanganan Fakir Miskin dari kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah hal ini dapat dilihat dari perubahan pendapatan masyarakat Desa Kaliwenang, yang sebelumnya hanya mengandalkan pendapatan dari mencari kayu yang kemudian di jual begitu pun juga dengan buruh tani.</p> <p>- Persamaan dengan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana penanganan fakir miskin juga untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh masyarakat.</p> <p>- Perbedaan ialah waktu dan lokasi penelitian yang dilakukan, serta permasalahan yang ditemukan.</p>
--	--	--	---

2.	Ariska Suriyanti (2021)	Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Fakir Miskin Di Kota Makassar	<p>- Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran Dinas Sosial dalam penanganan fakir miskin di Kota Makassar.</p> <p>-Metode penelitian menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Fakir Miskin Di Kota Makassar masih belum berperan aktif untuk meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat, sehingga program pemerintah untuk menangani masyarakat miskin di kota Makassar ini masih belum berjalan dengan baik.</p> <p>- Persamaan dengan penelitian ini ialah untuk mengetahui peran Dinas Sosial.</p> <p>- Perbedaan ialah waktu dan lokasi penelitian yang dilakukan, serta permasalahan yang ditemukan.</p>
----	-------------------------------	---	---

3.	Ityan Habibi (2016)	Implementasi Pelayanan Sosial Fakir Miskin di Dinas Sosial Kabupaten Jember.	<p>-Tujuan penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi pelayanan sosial fakir miskin di Dinas Sosial Kabupaten Jember.</p> <p>-Metode pendekatan deskriptif kualitatif.</p> <p>Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam Implementasi Pelayanan Sosial Fakir Miskin di Dinas Sosial Kabupaten Jember sudah berjalan cukup baik dengan adanya beberapa program tersebut sebagai pendukung dalam pelaksanaannya seperti program fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin serta pada program sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin.</p> <p>- Persamaan dengan penelitian ini ialah pelayanan sosial fakir miskin.</p> <p>-Sedangkan perbedaannya ialah sasaran dari program tersebut, waktu dan lokasi penelitian yang dilakukan, serta permasalahan yang ditemukan.</p>
----	------------------------	--	---

**Tabel 2.1** Penelitian Terdahulu

## 2.5 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan garis pemikiran yang disusun secara singkat untuk menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan dari awal, melalui proses pelaksanaan hingga akhir.

Kerangka berpikir juga dapat diartikan sebagai hubungan antar variabel yang disusun oleh teori yang diuraikan kemudian dianalisis lagi secara kritis dan sistematis untuk menghubungkan antar variabel penelitian. Kerangka pemikiran alur pemikiran penulis sendiri atau bahkan suatu teori yang dianggap relevan atau terfokus untuk menanggapi permasalahan yang muncul dalam rumusan masalah penulis.

Penulis mengambil teori peranan dari Veitzal Rivai (2004:148), peranan yang dimaksud ialah sebagai perilaku yang diatur serta diharapkan seseorang dalam posisi tertentu. Adapun indikator-indikator peranan menurut Veitzal Rivai di antaranya yaitu:

1. Perencanaan merupakan suatu kegiatan yang terkoordinasi untuk mencapai sebuah tujuan tertentu.
2. Pemosisian, posisi atau kedudukan yang dijalankan dalam melakukan hak dan kewajiban.
3. Penilaian, pencapaian yang sudah dilakukan.

Adapun kerangka pemikiran penelitian yang digambarkan oleh penulis adalah sebagai berikut:



**Bagan 2.1:** Kerangka Pemikiran Penelitian

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis dan Tipe Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian untuk mencapai hasil yang optimal harus menggunakan metode penelitian yang tepat. Ditinjau dari permasalahan penelitian ini yaitu mengenai Peranan Dinas Sosial Dalam Penanganan Fakir Miskin Di Kabupaten Simalungun.

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif. Menurut pendapat Bodgan dan *Taylor* (dalam Moleong 2010:4) bahwa metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari individu atau perilaku yang mereka amati. Selanjutnya, menurut V. Wiratna Sujarweni (2014:5) penelitian merupakan salah satu hal yang penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan, sekaligus bagian yang penting dalam perkembangan peradaban manusia. Metode penelitian ini dengan cara ilmiah (rasional, empiris dan sistematis) yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu untuk melakukan penelitian.

## 2. Tipe Penelitian

Menurut Sugiyono (2014: 13) metode deskriptif ialah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian dan untuk memecahkan masalah-masalah dalam masyarakat.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan desain penelitian studi kasus, sehingga penelitian ini dapat menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, sumber data tertulis beserta foto sesuai permasalahan dalam penelitian ini.

### 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan penulis adalah di bidang Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Simalungun. Yang terletak di Jalan Sondi Raya, Komplek SKPD Kabupaten Simalungun – Sumatera Utara. Dimana lokasinya tidak jauh dari Kantor Bupati Simalungun dan penelitian pada bulan Januari 2022.

Adapun tahapan perincian kegiatan yang dilakukan sebagaimana tertera pada tabel 3.1 berikut ini:

No	Kegiatan	Bulan ke :										
		Okt 2021	Nov 2021	Des 2021	Jan 2022	Feb 2022	Mar 2022	Apr 2022	Mei 2022	Jun 2022	Jul 2022	Agu 2022
1.	Penyusunan proposal											
2.	Seminar proposal											
3.	Perbaikan proposal											
4.	Pengambilan data/penelitian											
5.	Penyusunan skripsi											
6.	Seminar hasil											
7.	Perbaikan skripsi											
8.	Sidang meja hijau											

**Tabel 3.1 Waktu Penelitian**

### 3.3 Informan Penelitian

Informan penelitian ini memiliki peran yang sangat penting dalam pengambilan data dan informasi. Menurut Arikunto (2013: 130) informan ialah keseluruhan pada subjek penelitian yang dilakukan. Dapat dikatakan Informan penelitian merupakan orang yang dapat memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi latar belakang penelitian dan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini :

#### 1. Informan Kunci

Menurut pendapat Afrizal (2016:139) Informan kunci merupakan informasi yang didapatkan secara menyeluruh mengenai permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Informan kunci penelitian ini adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Simalungun (Sakban Saragih, SP,M.Si).

#### 2. Informan Utama

Menurut pendapat Afrizal (2016:139) Informan utama ialah orang yang mengetahui secara teknis dan detail mengenai masalah penelitian yang akan diteliti. Yang menjadi Informan utamanya yaitu Kepala Bidang Fakir Miskin di Dinas Sosial Kabupaten Simalungun (Andar Abdi Saragih, S.Pd, M.Si), dan Kepala seksi Penanganan Fakir Miskin di Bidang Pemberdayaan Sosial (Ando Saragih, S.Sos).

### 3. Informan Tambahan

Menurut pendapat Afrizal (2016:139) Informan tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam melakukan penelitian kualitatif dari orang yang dapat memberikan informasi tambahan. Informan tambahan penelitian ini adalah masyarakat fakir miskin di Kabupaten Simalungun (Opung Lesman Saragih, Ibu Ani Lingga).

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2015: 308) teknik pengumpulan data ialah langkah terpenting dalam penelitian karena tujuan utama penelitian ini adalah untuk memperoleh data. Teknik pengumpulan datanya dapat dilakukan melalui pengamatan (observasi), wawancara (interview), dan juga dokumentasi.

#### 1. Observasi

Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2015:203) mengatakan observasi merupakan suatu proses yang kompleks ataupun suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan observasi (pengamatan) untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Sosial dalam penanganan fakir miskin di Kabupaten Simalungun.

#### 2. Wawancara

Menurut Arikunto (2013:155) wawancara merupakan dialog yang dilakukan oleh pewawancara dengan narasumber untuk memperoleh informasi dari yang diwawancarai. Wawancara ini menggunakan teknik pengumpulan data dari

beberapa pertanyaan dan jawaban yang diajukan melalui percakapan tatap muka (langsung) antara pewawancara dengan informan untuk memperoleh data, informasi, sudut pandang dan pendapat dari tanggapan untuk memperoleh informasi.

### 3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu menurut Sugiyono (2015:329). Segala sesuatu yang dilakukan dalam penelitian ini berupa dokumentasi sangatlah diperlukan untuk dapat memperjelas penelitian bahkan menjadi data penting bagi peneliti.

### 3.5 Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai lapangan. Pada penelitian ini metode analisis data yang digunakan ialah menurut Miles dan Huberman.

#### 1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data ialah upaya untuk mengumpulkan data dengan berbagai cara, seperti: observasi, wawancara, dokumentasi, dan lain-lain.

#### 2. Reduksi Data

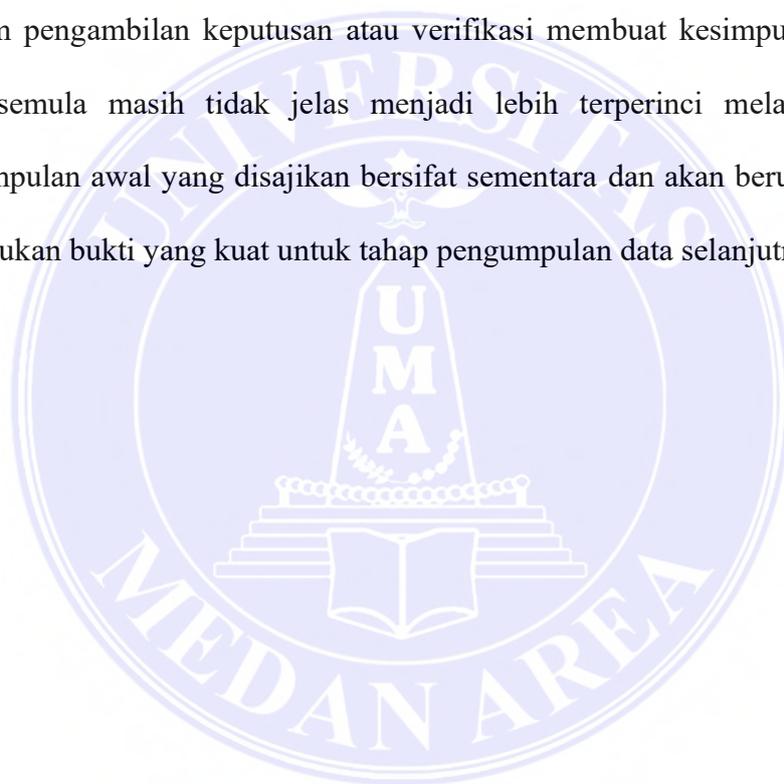
Reduksi data didefinisikan sebagai proses pengambilan yang berfokus pada penyederhanaan, abstraksi dan transformasi dari data yang muncul dari catatan yang ditulis di lapangan selama penelitian dilakukan untuk memilih informasi yang dianggap sebagai tempat penelitian lapangan.

### 3. Penyajian Data

Penyajian data sebagai kumpulan informasi terstruktur yang memberikan kesempatan untuk menarik kesimpulan atau mengambil tindakan. Pengumpulan data ini bisa membantu penulis memahami peristiwa yang terjadi berdasarkan pemahaman dan mengarah pada analisis dan tindakan lebih lanjut.

### 4. Kesimpulan Data

Dalam pengambilan keputusan atau verifikasi membuat kesimpulan sementara dari semula masih tidak jelas menjadi lebih terperinci melalui verifikasi. Kesimpulan awal yang disajikan bersifat sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti yang kuat untuk tahap pengumpulan data selanjutnya.



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Simalungun mengenai Peranan Dinas Sosial Dalam Penanganan Fakir Miskin Di Kabupaten Simalungun. Maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Peranan Dinas Sosial Dalam Penanganan Fakir Miskin Di Kabupaten Simalungun dengan menggunakan indikator dari Veitzal Rivai yang terdiri dari indikator perencanaan, pemosisian, dan penilaian bahwa peranan Dinas Sosial dalam menjalankan tugasnya dengan menetapkan kebijakan, pendampingan dan pemberdayaan, pengelolaan serta penyaluran bantuan bertujuan untuk membantu masyarakat kurang mampu (fakir miskin). Tetapi dalam hal pelaksanaannya masih belum berjalan dengan efektif. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan berbagai masalah dalam penanganan fakir miskin yang dijumpai seperti melalui pendataan yang lama bukan baru, masyarakat menerima bantuan tidak serta merta langsung menerima bantuan, masih adanya masyarakat terbilang mampu tetapi terdata sebagai masyarakat tidak mampu, pelayanan yang belum maksimal, dan kurangnya inisiatif dalam bekerja.
2. Hambatan Dinas Sosial Dalam Penanganan Fakir Miskin Di Kabupaten Simalungun yaitu kurangnya sumber daya manusia (SDM) dalam penanganan fakir miskin. Kurangnya sarana dan prasarana yang tidak memadai seperti

jaringan, dan alat teknologi lainnya sehingga menghambat pekerjaan yang dilakukan dalam menginput data.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peranan Dinas Sosial Dalam Penanganan Fakir Miskin Di Kabupaten Simalungun, penulis memberi saran sebagai berikut:

- a. Pemerintah khususnya Dinas sosial mendata kembali dan memperbaiki cara mendata agar pendataan fakir miskin Kabupaten Simalungun tepat sasaran.
- b. Dinas Sosial sebagai Pemerintah yang menangani langsung Fakir Miskin tentunya harus bekerja sama dengan kelompok atau komunitas yang bergerak di bidang sosial untuk merealisasikan misi penuntasan kemiskinan di Kabupaten Simalungun.
- c. Selain Dinas Sosial tentu diperlukan instansi lainnya seperti Kelurahan dan Kecamatan, harus betul-betul melibatkan diri dalam menentukan kategori miskin bukan mengutamakan orang-orang terdekat seperti keluarga, lurah atau lain sebagainya karena dapat menghambat misi penuntasan kemiskinan di Kabupaten Simalungun.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Afrizal. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Aziz, dan Hartono. 2009. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Indonesia*. Bogor.
- Basrowi. 2005. *Pengantar Sosiologi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- David Berry. 1995. *Pokok-pokok dalam Sosiologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Direktorat Bantuan Sosial Fakir Miskin, *Rencana Strategis Penanggulangan Kemiskinan Program Pemberdayaan Fakir Miskin*, Tahun: 2006-2010.
- Dumairy. 1997. *Perekonomian Indonesia*, Erlangga, Jakarta.
- Gunawan, I. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Habibi, I. (2020). *Implementasi Pelayanan Sosial Fakir Miskin Di Dinas Sosial Kabupaten Jember* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Jember).
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Jakarta: Erlangga.
- Lestari, V. (2021). *Peran tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Dalam Penanganan Fakir Miskin Di Kecamatan Loa Janan Ilir Kota*.
- Lukman Ali dkk. (2012). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Maipita, indra. (2014). *Mengukur Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan Medan*: UPP STIM YKPN.
- Poerwodarminta 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Balai Pustaka
- Rivai, Veitzal. 2004. *Kepemimpinan*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta

Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.

Sujarweni, V. W. (2014). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Soekanto, Soerjono. 2002. *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Soekanto soerjono; Sulistyowati, budi. (2017). *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta PT Raja Grafinso perseda Samarinda.

Taylor, dan Bogdan. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

## Jurnal

Bambang Ismawan, *Keuangan Mikro dalam Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, (Jakarta: BKKBN, 2003), 102.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007) Ed Ke-3, Cet. Ke-4, h.854.

Dillon H.S dan Hermanto, *Kemiskinan di Negara Berkembang Masalah Krusial Global*, (Jakarta: LP3ES, 1993), 10.

Edy Suhardono, “*Teori Peran Konsep, Derivasi, dan Implikasinya*” Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994. Hlm.3.

Kurniawan, R., Takdir, T., Iskandar, H., & Asmara, R. (2020). *Optimalisasi Pemberian Bantuan Sosial Kepada Fakir Miskin pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*. *Asia-Pacific Journal of Public Policy*, 6(2), 126-149.

Mudrajad Kuncoro, *Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah dan Kebijakan*, (Yogyakarta: AMP YKPN, 2003), 107.

Muhammad dan Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan: Instrumen pemberdayaan ekonomi umat*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 71.

## Skripsi

Reknani, Duwi. 2015. Implementasi Program Penanganan Fakir Miskin Melalui Kegiatan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (PS-KAT). Politik dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang.

Suriyanti, Ariska. 2021. Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Fakir Miskin di Kota Makassar.

Ityan Habibi (2016) tentang Implementasi Pelayanan Sosial Fakir Miskin di Dinas Sosial Kabupaten Jember.

### **Website**

Jumlah penduduk Indonesia <http://money.kompas.com>, akses 22 Oktober 2021.

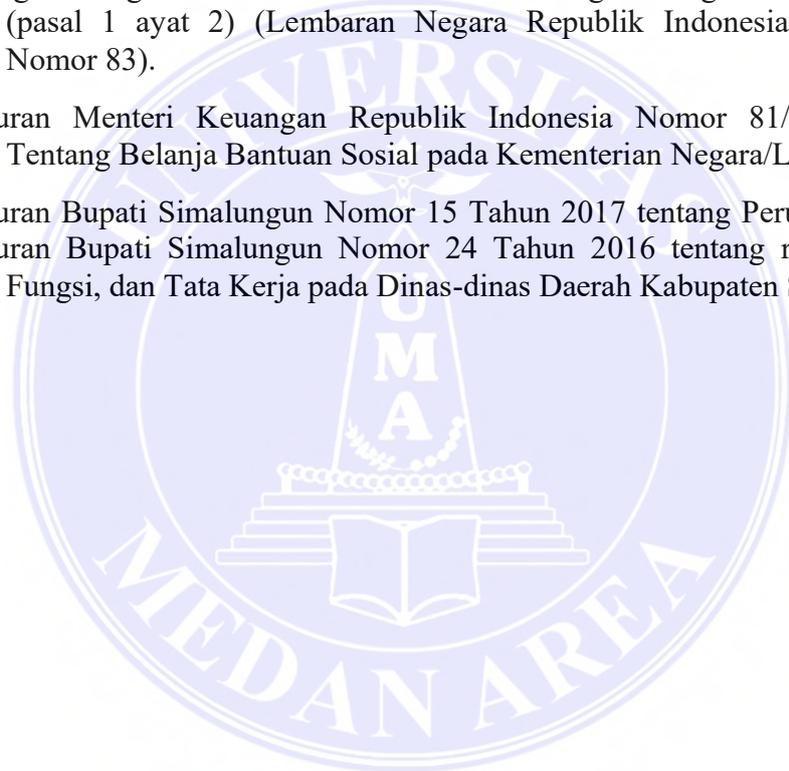
### **Perundang-Undangan**

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 Tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (pasal 1 ayat 2) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/PMK.05/2012 Tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.

Peraturan Bupati Simalungun Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Simalungun Nomor 24 Tahun 2016 tentang rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja pada Dinas-dinas Daerah Kabupaten Simalungun.



## LAMPIRAN

### Lampiran 1 : Dokumentasi Penelitian



Kantor Dinas Sosial Kabupaten Simalungun  
(Rabu, 12 Januari 2022)



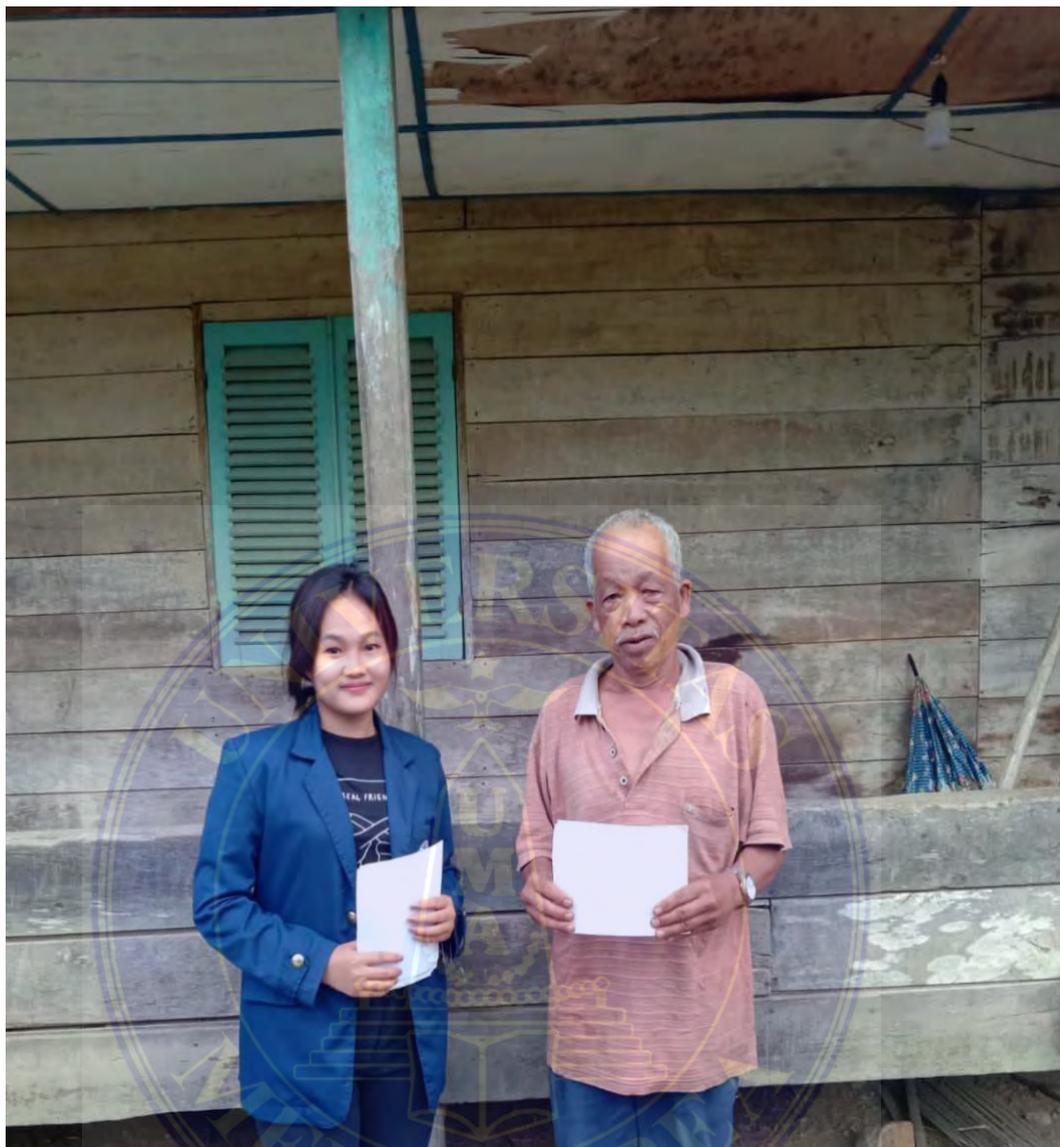
Dokumentasi peneliti setelah wawancara dengan informan kunci yaitu Bapak Sakban Saragih, SP,M.Si, selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Simalungun.  
(Rabu, 12 Januari 2022 Pukul 11.25 WIB).



Dokumentasi peneliti setelah wawancara dengan informan utama yaitu Bapak Andar Abdi Saragih, S.Pd. M.Si, selaku Kepala Bidang Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Simalungun. (Rabu, 12 Januari 2022 Pukul 11.30WIB).



Dokumentasi peneliti setelah wawancara dengan informan utama yaitu Bapak Ando Saragih, S.Sos, selaku Kepala seksi Penanganan Fakir Miskin di Bidang Pemberdayaan Sosial Kabupaten Simalungun. (Rabu, 12 Januari 2022 Pukul 15.00 WIB).



Dokumentasi peneliti setelah wawancara dengan informan tambahan yaitu Opung Lesman Saragih sebagai masyarakat fakir miskin Kabupaten Simalungun. (Kamis, 13 Januari 2022 Pukul (08.30 WIB).



Dokumentasi peneliti setelah wawancara dengan informan tambahan yaitu Ibu Ani Lingga sebagai masyarakat fakir miskin Kabupaten Simalungun. (Kamis, 13 Januari 2022 Pukul (09.00 WIB)).

## Lampiran 2 : Data Informan

### 1. Informan Kunci

Nama : Sakban Saragih, SP,M.Si  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Usia : 49 Tahun  
Jabatan : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Simalungun

### 2. Informan Utama

Nama : Andar Abdi Saragih, S.Pd, M.Si  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Usia : 35 Tahun  
Jabatan : Kepala Bidang Fakir Miskin Kabupaten Simalungun

### 3. Informan Tambahan

Nama : Ando Saragih, S.Sos  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Usia : 46 Tahun  
Jabatan : Kepala seksi Penanganan Fakir Miskin di Bidang Pemberdayaan Sosial Kabupaten Simalungun.

### 4. Informan Tambahan

Nama : Lesman Saragih  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Usia : 62 Tahun  
Pekerjaan : Petani

### 5. Informan Tambahan

Nama : Ani Lingga

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 39 Tahun

Pekerjaan : Petani dan Pembantu rumah tangga



### Lampiran 3 : Pedoman Wawancara

Daftar pertanyaan untuk informan kunci yaitu Kepala Dinas Sosial.

1. Perencanaan seperti apa yang akan dilakukan Dinas Sosial dalam penanganan fakir miskin di Kabupaten Simalungun?
2. Adakah kebijakan-kebijakan yang dibuat dalam penanganan fakir miskin? dan apa tujuannya!
3. Dinas Sosial mempunyai tugas pokok dan fungsi. Menurut bapak sebagai Kepala Dinas Sosial apakah tupoksi di setiap bidang sesuai pemosisian yang dijalankan?
4. Dari segi penilaian, apakah penanganan fakir miskin tersebut sudah berjalan efektif?
5. Apa saja hambatan Dinas Sosial dalam penanganan fakir miskin di Kabupaten Simalungun?

Daftar pertanyaan untuk informan utama yaitu Kepala Bidang Fakir Miskin dan Kepala Seksi penanganan fakir miskin dibidang pemberdayaan sosial.

1. Perencanaan seperti apa yang akan dilakukan Dinas Sosial dalam penanganan fakir miskin di Kabupaten Simalungun?
2. Apakah bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat fakir miskin sudah terealisasi?
3. Apakah tugas pokok dan fungsi di setiap bidang sesuai pemosisian yang dijalankan?
4. Apakah penanganan fakir miskin tersebut sudah berjalan efektif?

5. Apa saja hambatan Dinas Sosial dalam penanganan fakir miskin di Kabupaten Simalungun?

Daftar pertanyaan untuk informan tambahan yaitu masyarakat fakir miskin di Kabupaten Simalungun.

1. Bagaimana Anda melihat sejauh ini peranan Dinas Sosial dalam penanganan fakir miskin ?
2. Bagaimana proses pendataan yang dilakukan Dinas Sosial terhadap masyarakat dan bagaimana pelayanannya?
3. Berupa apa saja bantuan yang diberikan ?

